ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK CAFE TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KELURAHAN KUTOANYAR

1. M YAYAN FATCHUR ROCHMAN (19.60203.100085)

Email : rochmanfachtur510@gmail.com

2. WIDIA EKA OKTAVIANA (19.60203.100113)

Email : widyaocta761@gmail.com

3. YUNIAR DWI YOGA RISKI (19.60203.100096)

Email : yuniardwiyogariski@gmail.com

Abstract

In the city of Tulungagung, creative economy entrepreneurs have begun to emerge who develop various kinds of innovation and creativity. One sector The creative economy that is experiencing an increase is from the culinary sector. The growth of more cafes and food courts will increase income the restaurant tax sector indirectly affects Original Income Area. This is what encourages researchers to conduct further research in order to compile a mini research. The problems studied in this study is how the potential contribution of cafe and food court taxes to income Original Region (PAD) Tulungagung? and how entrepreneurs in an Islamic perspective? This study aims to find out how much is the contribution of cafe and food court taxes to local revenue (PAD) in Tulungagung creative economy entrepreneurs

Keywords : income , economy, cafe

Abstrak

Di kota Tulungagung, salah satunya di Kelurahan Kutoanyar pengusaha ekonomi kreatif sudah mulai bermunculan yang mengembangkan berbagai macam inovasi dan kreativitas. Satu sector Ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan adalah dari sektor kuliner. Pertumbuhan lebih banyak kafe dan food court akan meningkatkan pendapatan sektor pajak restoran secara tidak langsung mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyusun mini penelitian.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini Bagaimana potensi kontribusi pajak kafe dan food court terhadap pendapatan? Daerah Asli (PAD) Tulungagung? dan bagaimana pengusaha dalam perspektif Islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kontribusi pajak kafe dan food court terhadap pendapatan asli daerah? (PAD) pengusaha ekonomi kreatif di Tulungagung. Dan juga menurut hasil pengolahan data peneliti dapat disimpulkan bahwa potensi pajak cafe dan pujasera berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 1,78% dan pada tahun 2021 sebesar 1,42%.

Kata kunci : Pendapatan , ekonomi , kafe

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah yang bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Telah kita ketahui bahwa tujuan Pendapatan asli daerah itu sendiri yaitu diharapkan dapat meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat serta juga pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah tergantung pada masyarakat yang ada di daerah itu. Maksudnya semakin tinggi pendapatan masyarakat setempat maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Baik melalui pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu profesi yang memberikan sumbangsi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah entrepreneurs atau wirausaha.

Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya

bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.

Kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomi, dan kemandirian adalah keberdayaan. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja.

Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Schumpeter salah satu ekonom pengagas teori pertumbuhan ekonomi menyatakan enterpreuner mempunyai andil besar dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Semakin banyak suatu negara memiliki entrepreneurs maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut semakin tinggi.

Perkembangan entrepreneur di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara asia lain. Pernyataan ini dapat dilihat dari jumlah entrepreneurs yang ada di Indonesia sebanyak 1,26 % dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan menurut pendapat David Mc Clelland yang menguatkan teori schumpeter bahwasannya suatu negara akan makmur apabila memiliki enterpreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduknya. Sayangnya di Indonesia jumlah entrepreneurnya masih sedikit dan mutunya masih belum bisa dikatakan hebat untuk menopang perekonomian, sehingga persoalan wirausaha ini menjadi persoalan yang mendesak bagi suksesnya pembangunan perekonomian di Indonesia. Entrepreneurs diharapkan mampu menjadi lokomotif perekonomian Indonesia, terutama entrepreneurs yang kreatif dan inovatif.

Artinya, mereka tidak hanya bisa bekerja tetapi juga mempunyai keahlian dan keterampilan yang memadai. Ide kreatif sangat dibutuhkan untuk memenangkan persaingan kompetisi antar produk. Tanpa kreativitas, produk yang dihasilkan akan kalah dari produk baru yang bermunculan.

Dengan berbagai inovasi yang dilakukan entrepreneurs maka dapat disimpulkan bahwa entrepreneurs akan mampu memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan akhirnya kondisi ini akan membuat aktivitas ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih baik dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan masalah dan tujuan

1. Bagaimana kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kelurahan Kutoanyar ?

2. Apa faktor dan masalah pengusaha dalam membayar pajak?

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengetahui factor dan masalah pengusaha dalam membayar pajak

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

2. Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 35 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah BAB I ketentuan umum adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut undang-undang no.34 Tahun 2000 adalah terdiri dari penerimaan dari daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dari beberapa definisi diatas dapat difahami bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lainnya, semuanya diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2) Teori Pemungutan Pajak Teori pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:3) terbagi menjadi lima, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli

a) Teori asuransi, teori ini menjelaskan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak kepada negara karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b) Teori kepentingan, teori ini menjelaskan mengenai pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing individu. Semakin besar kepentingan individu terhadap negara maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c) Teori daya pikul, teori ini menjelaskan mengenai beban pajak untuk semua individu harus sama beratnya, dimana pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing individu tersebut. Teori daya pikul menggunakan dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

d) Teori bakti, teori ini menjelaskan mengenai kewajiban seorang warga negara yang baik, harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

e) Teori asas daya beli, teori ini menggambarkan mengenai akibat dari pemungutan pajak, maka negara yang menerima pajak dari warga negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai setiap pengeluaran negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan Withholding Assessment System:

a) Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dari fiskus.

b) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak

aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) Withholding Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3) Berdasarkan Golongan:

A) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberika kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala,tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

Contohnya : pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bilawajib pajak menjual barang mewah.

B) Pajak langsung (Direct Tax) Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus di tanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke Pendapatan Asli Daerah pihak yang lain.

Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

C) Pajak Daerah Berdasarkan Instansi Pemungut :

1) Pajak hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7) Pajak Parkir

8) Pajak Lain-Lain

4). Retribusi Daerah

A) Pengertian Retribusi Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaia pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan pengguna jasa.

B) Objek Retribusi Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu:

1) Jasa Umum Dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Jasa Usaha Dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

(A) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau

(B) Pelayanan oleh pihak pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

(C) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan Pendapatan Asli Daerah, tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi Pendapatan Asli Daerah harga pasar.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahaga, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Perizinan Tertentu

Menurut pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah ke Pendapatan Asli Daerah orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

4). Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

5). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-undang.⁴³ Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan daerah. Jika pembangunan daerah lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka supaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.

6). Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan / dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah

nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan /dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service), atau pemesanan dibawa (take away order), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Secara sederhana yang menjadi subjek pajak restoran adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang restoran.

b. Dasar Pengenaan pajak restoran Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar saat pembelian makanan dan minuman.

Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, dibawah pemilikan atau pengusaha orang pribadi atau badan yang sama. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengkalikan tarif.

c. Sistem pemungutan pajak restoran Pemungutan pajak restoran dilakukan setiap bulannya. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Mekanisme pemungutan pajak restoran dari self assessment system diantaranya adalah⁴⁶ :

- 1) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
- 2) Dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) hasil tersebut merupakan pajak terutang.

3) Dari pajak terutang tersebut muncullah kredit pajak, sehingga apabila pajak terutang dikurangi kredit pajak, dan apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, maka bisa muncul pajak kurang bayar. Apabila pajak terutang sama dengan kredit pajak maka terjadilah pajak nihil bayar, dan apabila pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak maka hal tersebut disebut lebih bayar. Dari lebih pajak maka pajak tersebut dapat di restitusikan/ di kompensasikan.

4) Dalam hal membayar, pajak dapat dilunasi dalam tahun berjalan dan pajak bisa juga terjadi kurang bayar, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010 dan 2011 (studi kasus dinas pendapatan daerah kabupaten sleman), skripsi, menjelaskan bahwasanya pajak dan retribusi sangat berkontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Untuk mengetahui kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap potensi pajak restoran maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:⁴⁸ Rumus $\% = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$ Sedangkan untuk menghitung kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan rumus dibawah ini: Rumus $\% = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$ Pajak daerah merupakan iuran dari masyarakat kepada pemerintah, diantara masyarakat yang menjadi subjek pajak adalah pengusaha swasta, baik itu usaha mikro kecil menengah maupun usaha besar.

Dan pengenaan persentase pajak tergantung objek pajaknya, misalnya untuk pajak restoran. Yang termasuk objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Sedangkan pengenaan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar sebesar 10%.

7). Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian dan Karakteristik UMKM Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM kriteria untuk mendefinisikan UMKM seperti tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Parameter nasional maupun internasional untuk mengelompokkan dunia usaha menggunakan parameter jumlah karyawan, total aset, dan atau total penjualan. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar. Misalnya menurut BPS usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja dan usaha menengah 20 sampai dengan 99 orang pekerja.⁵⁰ Beberapa alternatif dan

pendekatan pengelompokan yang digunakan oleh sebuah lembaga belum tentu berlaku universal dan kriteria yang digunakan oleh lembaga yang sama pun dapat berubah sesuai dengan perkembangan bisnis dan berjalannya waktu. Salah satu pendekatan umum yang banyak digunakan secara internasional antara lain :

a. Usaha Mikro Umumnya usaha informal dan tidak memiliki status legal yang formal, dilakukan oleh orang dari kelompok miskin, khususnya wanita, tidak memiliki perencanaan bisnis yang formal,

b. Usaha Kecil Umumnya terdaftar dan dijalankan oleh keluarga atau kelompok, pemilik dan pengelola dilakukan oleh orang yang sama, biasanya belum memiliki catatan keuangan dan catatan bisnis yang akurat dan belum memiliki auditor, dalam beberapa hal telah memiliki legalitas formal.

c. Usaha Menengah Umumnya skala bisnis cukup besar, telah memiliki struktur organisasi dan delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan, catatan keuangan sudah tertib, transparan dan akurat, telah menggunakan auditor independen, memiliki direktur keuangan yang bertanggung jawab dalam kebijakan pembiayaan perusahaan.

8). Jenis Permodalan UMKM Jenis permodalan pada usaha mikro sesuai dengan rangkaian atau tahapantahapan perkembangan UMKM itu sendiri, yaitu :

a. Modal awal (modal usaha), sumber pembiayaan tahap awal ini umumnya dari uang pribadi dan berbagai sumber lainnya yang diupayakan oleh pemiliknya yang umumnya sudah dikenal baik.

b. Investasi, pada tahapan ini perusahaan mulai tumbuh melampaui batas kemampuan pemilik perusahaan. Guna membiayai perusahaan memerlukan berbagai sumber pembiayaan lainnya seperti halnya kredit.

c. Pada tahap akhir, apabila UMKM dapat berkembang dengan baik, UMKM dapat memanfaatkan lembaga perbankan sebagai sumber dana pembiayaan. Jenis permodalan UMKM yang utama adalah modal pribadi, karena rata-rata kecilnya usaha yang tidak memenuhi kriteria pengajuan kredit pada lembaga perbankan sehingga para pelaku UKM lebih menggunakan modal pribadi sebagai modal utama berjalannya usah.

9). Jenis-Jenis UMKM Fleksibelnya UMKM dalam menghadapi hambatan membuat UMKM mudah berpindah-pindah usaha dari satu usaha keusaha lainnya. Sesuai dengan

kecenderungan yang ada, perkembangan dunia usaha di Indonesia mengarah pada bermunculannya model-model usaha mikro kecil menengah, antara lain:

a. Usaha Jasa Usaha jasa saat ini merupakan yang terbesardan cepat pertumbuhannya dalam dunia usaha kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi wirausaha kecil yang mampu berinovasi tinggi. Misalnya, jasa penyewaan mobil, konsultasi manajemen, rumah produksi dan lain-lain.

b. Usaha Eceran Bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil. Usaha eceran adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada konsumen.

c. Usaha distribusi Usaha ini adalah satu-satunya usaha yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

d. Usaha pertanian/ Agribisnis Pertanian adalah bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama-lama menjadi sebuah usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan masyarakat satu sama lain.

e. Usaha Manufaktur Usaha manufaktur merupakan suatu usaha kecil yang saat ini sering kali di kategorikan masuk dalam jenis industri kreatif. Contohnya kerajinan tangan, percetakan, dan lain-lain. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang padat karya mini modal, sehingga kebanyakan usahanya merupakan usaha yang fleksibel dalam menghadapi hambatan dan banyak modelnya seperti usaha jasa, eceran, distribusi, pertanian dan manufaktur yang tersebar diseluruh pelosok wilayah. UMKM merupakan salah satu usaha yang tahan banting untuk menghadapi segala situasi, termasuk dalam kondisi krisis. UMKM memiliki efek multiplier yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Untuk menjaga eksistensi maka UMKM harus mampu bersaing dengan produk-produk lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Agar mampu bersaing produk yang dihasilkan merupakan produk yang dikembangkan dengan kreatif dan inovatif, serta diupayakan untuk meningkatkan kualitas usaha.

10). Entrepreneurs

A. Pengertian Entrepreneur atau wirausaha Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesian diberi nama kewirausahaan. Istilah ini

diawali oleh Richard Cantillon (1755), yaitu Entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new. Kemudian kata-kata tersebut diberi makna sebagai orang-orang yang melaksanakan/melakukan sesuatu yang berisiko dari usaha-usaha baru.

B Wirausaha atau entrepreneurs yang berasal dari bahasa kontribusicis entreprende yang berarti melakukan (to undertake) atau mencoba (trying). Kata “entreprendre” diartikan juga sebagai “di antara pengambil” (between taker) atau “kontribusitara” (go-between).

Entrepreneurs atau kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perpajakan cafe dikelurahan kutoanyar untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan . Dengan demikian, penelitian ini hanya mengkaji satu variabel atau variabel tunggal yaitu pelaksanaan perpajakan cafe dikelurahan kutoanyar untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan desa kutoanyar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penulis memberikan gambaran tentang upaya sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta kendala-kendala yang dialami dalam penyampaian Pajak Bumi dan Bangunan kepada pengusaha di kecamatan kutoanyar. Informasi dalam penelitian ini adalah beberapa pengusaha dan BAPENDA yang dipandang dapat memberikan informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:

- a) Observasi yang digunakan sebagai teknik pertama dilakukan untuk mengamati secara langsung di lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tulungagung untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Dokumentasi, cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c) Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang dianggap kompeten dengan masalah yang diteliti mengenai pelaksanaan sosialisasi dan kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi pengusaha di kecamatan kutoanyar. Analisis Data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pajak Cafe dikelurahan kutoanyar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Tulungagung Pajak cafe adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh cafe. Cafe adalah fasilitas penyedia makanan / dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Besaran jumlah pajak yang dibayarkan tergantung dengan pendapatan yang diterima setiap bulan, terkadang jumlah yang dibayarkan

berbeda-beda setiap bulannya. Dasar pengenaan tarif pajak adalah 10 % dari jumlah pendapatan yang diterima wajib pajak. Faktor yang menentukan sedikit atau banyaknya jumlah pajak yang dibayarkan adalah tergantung banyak sedikitnya konsumen yang mengunjungi rumah makan, restoran maupun cafe yang menjadi wajib pajak. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Mekanisme pemungutan pajak restoran dari self assessment system diantaranya adalah

- a. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).
- b. Dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) hasil tersebut merupakan pajak terutang.. Mereka mengalikan jumlah pendapatan dengan tarif pajak sebesar 10 %. Jadi pendapatan cafe setiap bulannya sebesar 10% akan dibayarkan sebagai pajak restoran.
- c. Dari pajak terutang tersebut muncullah kredit pajak, sehingga apabila pajak terutang dikurangi kredit pajak, dan apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, maka bisa muncul pajak kurang bayar. Apabila pajak terutang sama dengan kredit pajak maka terjadilah pajak nihil bayar, dan apabila pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak maka hal tersebut disebut lebih bayar. Dari lebih pajak maka pajak tersebut dapat di restitusikan/ di kompensasikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil skripsi penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

Kontribusi potensi pajak cafe dan pugasera terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan membandingkan pajak cafe dan pugasera pada jumlah potensi pajak restoran maka, dapat disimpulkan cafe dan pugasera pada tahun 2020 berkontribusi dalam menyumbangkan pajak sebesar 15,15 % dan pada tahun 2017 sebesar 18,5% terhadap pajak restoran. Dan juga menurut hasil pengolahan data peneliti dapat disimpulkan bahwa potensi pajak cafe dan

pujasera berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 1,78% dan pada tahun 2021 sebesar 1,42%.

B. SARAN

1. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terutama UPT yang ada dikecamatan supaya lebih aktif menggalakan pemungutan pajak dan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak.
2. Bagi entrepreneurs Ekonomi Kreatif harus berwirausaha sesuai dengan prinsip Islam. Diharapkan kedepannya dalam berwirausaha harus menjunjung tinggi prinsip transparansi terutama dalam hal komposisi, cara pembuatan produk. Serta para entrepreneurs ekonomi kreatif selalu mencantumkan label halal terutama dibidang kuliner, hal ini menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk dan juga memberi rasa aman.
3. Penelitian ini terbatas karena data yang digunakan sebatas data potensi pajak cafe dan pujasera, akan lebih relevan jika menggunakan data realisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A.G Kartasapoetra, Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian, Jakarta : Bina Aksara , 1988.

A.W. Widjaja, Otonomi daerah dan Daerah otonom, Jakarta : PT Raja Grafindo

Yogyakarta : Andi, 2005. Badrudin Rudy , Ekonomika Otonomi Daerah, Yogyakarta : UPP STIMYKPN, 2012. Frinces Z.Heflin , Be An Entrepreneur (Jadilah Seorang Wirausahawan)

Kajian Strategis Pengembangan kewirausahaan, Yogyakarta : Graha Ilmu ,2011.

Gitosudarmo Indriyo , Pengantar Bisnis, Edisi, Yogyakarta : BPFE, 2003.

Keuangan Daerah, Jakarta : Salemba Empat, 2004. Hasan Iqbal , Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. Hendro, Dasar-Dasar Kewirausahaan,